ANALISIS KESENJANGAN PERSEPSI NELAYAN DAN PELAKSANA TEKNIS TERHADAP KEBERADAAN KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP DI DESA MUARA GADING MAS, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

THE GAP ANALYSIS OF FISHERMAN'S PERCEPTION AND TECHNICAL IMPLEMENTATION TO THE EXISTENCE OF CAPTURE FISHERY POLICY IN MUARA GADING MAS VILLAGE, LABUHAN MARINGGAI DISTRICT, LAMPUNG TIMUR REGENCY

Rizka Helisia Putri¹, Abdullah Aman Damai^{1,2*}, Supono^{1,2}, Indra Gumay Febryano¹, Hengky Mayaguez^{1,2}

¹Program Studi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana, Universitas Lampung

²Jurusan Kelautan dan Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

Email: aman.metil@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sektor perikanan tangkap memiliki peranan penting bagi perekonomian di wilayah pesisir, sehingga perlu program kebijakan yang sesuai untuk mendukung sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis persepsi masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan program kebijakan terkait perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara menggunakan kuisioner. Data tersebut dianalisis persepsi hubungan dengan skala *Likert* terhadap sasaran kebijakan, keberhasilan kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas kebijakan dan sarana prasarana serta lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kesenjangan antara persepsi nelayan dan pelaksana teknis karena ketidakpercayaan kedua pelaksana terhadap pengelolaan kebijakan perikanan tangkap guna mengembangkan Desa Muara Gading Mas. Untuk mengatasi kesenjangan persepsi tersebut diperlukan rekayasa perilaku (*social engginer*) pada nelayan melalui pendirian koperasi/ badan usaha yang berizin dan didukung oleh pemerintah sebagai subjek dan wadah nelayan meminjam modal guna memutus rantai sistem patron klien di Desa Muara Gading Mas.

Kata kunci: persepsi, kebijakan, perikanan tangkap

ABSTRACT

The capture fisheries sector has an important role for the economy in coastal areas. Appropriate policy programs are needed to support a sustainable capture fisheries sector. The purpose of this study is to analyze public and government perceptions of the existence of policy programs related to capture fisheries in Muara Gading Mas Village, Labuhan Meringgai District, East Lampung Regency. Data collection was carried out by observation and interviews using a questionnaire. The data was analyzed by the perception of the relationship with the Likert scale on policy objectives, policy success, policy implementers, policy supervisors and infrastructure and the environment. The results shows that there is a discrepancy between fishermen's perceptions and technical implementers due to the distrust of the two implementers towards the management of capture fisheries policies in order to develop Muara Gading Mas Village. To overcome this perception gap, behavioral engineering (social engineer) is needed for fishermen through the establishment of cooperatives/business entities that are licensed and supported by the government as subjects and vessels for fishermen to borrow capital to break the chain of the patron client system in Muara Gading Mas Village.

Keywords: perception, policy, capture fisheries

PENDAHULUAN

Perikanan tangkap merupakan aktivitas yang umum dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai mata pencaharian sehari-hari (Handrian & Hawa, 2022; Gumilar dan Nuryasin, 2022). Menurut Ramlan et al. (2020) laut dan pesisir memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Potensi sektor perikanan sangat penting untuk dikelola mengingat sumberdaya bersifat *open access*. Oleh karena itu, pengelolaan tersebut harus melalui implementasi kebijakan yang sesuai guna memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat pesisir (Chikmawati, 2019).

Pengelolaan perikanan tangkap harus diiringi kebijakan dan monitoring agar tidak terjadi degradasi pada sumber daya dan lingkungan (Hardian et al. 2020). Namun pada pelaksanaannya kebijakan tidak boleh menfokuskan kepada visi dan misi pemerintah saja, melainkan harus melibatkan nelayan pada proses perumusan kebijakan. Pada praktiknya implementasi kebijakan belum mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini karena kebijakan tersebut tidak berorientasi kepada pemberian keterampilan, kesempatan dan ilmu pengetahuan kepada nelayan (Sopyan, 2014).

Hal ini kemungkinan disebabkan kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan (Febryano et al. 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi nelayan dan pelaksana teknis terhadap keberadaan program kebijakan di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2022 dengan lokasi di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penentuan responden menggunakan teknik *Random Sampling*. Jumlah nelayan yang ada di Desa Muara Gading Mas berdasarkan data HNSI terdapat 1.550 kemudian dihitung berdasarkan rumus slovin dengan batas toleransi 15% diperoleh jumlah sampel sebanyak 44 nelayan. (Nalendara et al. 2021).

Penentuan responden pada pelaksana teknis menggunakan *purposive sampling*. Penilaian persepsi nelayan dan pemerintah di

analisis menggunakan skala *Likert* untuk menilai keberadaan program kebijakan di Desa Muara Gading Mas dengan lima aspek yang digunakan diantaranya sasaran kebijakan, keberhasilan kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawasan kebijakan dan sarana prasarana serta kondisi lingkungan dengan masing-masing aspek terdiri dari sepuluh pertanyaan.

Penilaian indikator pada tiap aspek menggunakan bobot penilaian saat di lapangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Bobot Skala *Likert*

Pernyataan	Nilai
Sangat Tidak Setuju	5
Tidak Setuju	4
Ragu-ragu	3
Setuju	2
Sangat Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2014); Denada et al. (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Nelayan dan Pelaksana Teknis Terhadap Keberadaan Program Kebijakan Perikanan Tangkap di Desa Muara Gading Mas

Persepsi nelayan di Desa Muara Gading meliputi dari 44 responden dengan rincian 24 orang Anak Buah Kapal (ABK). Sedangkan pelaksana teknis terdiri dari 4 orang dengan rincian Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi dan Pengawasan, Kepala PPP Labuhan Maringgai, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten. Hasil penelitian persepsi nelayan dan pelaksana teknis disajikan pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 dapat dilihat persepsi masyarakat dan pemerintah memperoleh hasil yang tidak seragam. Hal ini karena masyarakat dan pemerintah belum selaras dalam memahami dan melaksanakan program kebijakan di desa tersebut terkait dengan aspek sasaran kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawasan kebijakan, sarana prasarana dan lingkungan sehingga menghasilkan keberhasilan kebijakan yang berbeda. Perbedaan tersebut diperkuat dengan adanya sistem patron klien yang di pertahankan oleh masyarakat nelayan, sedangkan faktor dari pelaksana teknis yaitu program kebijakan tersebut dilaksanakan tidak memperhatikan kesesuaian kebutuhan kebijakan di desa, waktu pelaksanaan yang tidak tepat, dan alokasi anggaran dana yang

Tabel 2. Jumlah Skor Persepsi Nelayan dan Pemerintah

Aspek Kebijakan	Interval Kelas					Skor	Keterangan
	1	2	3	4	5		
Persepsi Nelayan							
Sasaran	0-56	57-113	114-170	171-227	228-284	88	rendah
Keberhasilan	0-35	36-71	72-107	108-143	144-200	89	ragu-ragu
Pelaksana	0-57	58-115	116-173	174-231	232-289	90	Rendah
Pengawasan	0-25	26-51	52-77	78-103	67-143	87.6	Rendah
Sarana Prasarana dan Lingkungan	0-69	70-139	140-209	210-279	280-349	94	Rendah
Persepsi Pemerintah							
Sasaran	0-1	2-3	4-6	7-8	9-10	8	Tinggi
Keberhasilan	0-3	4-7	8-11	12-15	16-19	7.2	Ragu-ragu
Pelaksana	0-2	3-5	6-8	9-12	13-15	13	Sangat tinggi
Pengawasan	0-3	4-7	8-11	12-15	16-19	13.3	Tinggi
Sarana Prasarana dan Lingkungan	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	13	Ragu-ragu

terbatas. Uraian perbedaan tersebut di rincikan menggunakan 5 aspek dari hasil kuisioner sebagai berikut:

Sasaran Kebijakan

Hasil persepsi menunjukkan terjadinya kesenjangan antara nelayan dan pelaksana teknis terhadap efisiensi dan produktivitas kebijakan. Sasaran kebijakan berhubungan dengan efisiensi dan produktivitas dari pelaksanaan kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) indikator efisiensi menggambarkan pola hubungan antara sumber daya yang ada dengan unit pelaksana sehingga dihasilkan kebijakan yang tepat sesuai relokasi anggaran. Namun pada hasil persepsi nelayan dan pelaksana teknis diperoleh kesenjangan yang berbeda sehingga dapat dikatakan sasaran kebijakan belum optimal dilakukan. Menurut Parsons (2001) kepentingan publik harus melihat kekuatan dari objek dan subjek yang ada untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu sasaran kebijakan harus memenuhi 5 syarat sebagai berikut: (1) Organisasi yang terstruktur dengan jelas dan tidak tumpang tindih. (2) Tujuan dari kebijakan tersebut. (3) Penegakan norma-norma budaya masyarakat. (4) Masyarakat secara sukarela melaksanakan apa yang diperintah. (5) Komunikasi antara pemerintah dan nelayan yang baik. (5) Tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan tersebut

Keberhasilan Kebijakan

Keberhasilan kebijakan didasarkan pada komunikasi antar pelaksana program kebijakan itu sendiri. Namun tidak hanya kualitas program kebijakan saja, akan tetapi peran serta dari masyarakat ikut dalam

program kebijakan tersebut. Selanjutnya perlu adanya pengawasan dari pelaksanaan dan pasca pelaksanaan program kebijakan tersebut dengan demikian program kebijakan tersebut akan dapat dievaluasi untuk kekurangan yang ditemukan.

Persepsi nelayan dan pelaksana dalam aspek ini menghasilkan skor yang sama mengatakan bahwa ragu-ragu dalam pencapaian keberhasilan kebijakan. Hal ini karena terbatasnya implementasi kebijakan yang dilaksanakan dan anggaran dana yang terbatas. Oleh karena itu menurut Nugroho (2003) pemerintah sebelum membuat kebijakan terlebih dahulu mengkaji dampak yang dihasilkan, sebab dalam implementasi kebijakan akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Kegagalan pencapaian kebijakan di dukung dengan sesuai pendapat Agustino (2008) bahwa kebijakan yang utopis (ideal) yang tidak sesuai kondisi, akan sulit untuk direalisasikan. Selain itu kebijakan akan tetap menemukan masalah tergantung pada isi dan konteks kebijakan. (Grindle, 1980).

Pelaksana Kebijakan

Penilaian persepsi dari aspek indikator ini menghasilkan perbedaan antara masyarakat dan pemerintah. Menurut masyarakat badan pelaksana, pelaku pelaksana dan implementasi pelaksana berkategori rendah pemerintah maupun nelayan dinilai sangat rendah dalam berperan aktif melaksanakan program kebijakan meliputi waktu yang tidak tepat bersamaan dengan nelayan melaut, anggaran dana yang minim, program kebijakan yang tidak continue dan jumlah pemerintah yang turun ke desa sedikit. Perbedaan hasil tersebut

terjadi karena ketidakpercayaan kedua pelaksana terhadap dampak pelaksanaan kebijakan di Desa Muara Gading Mas.

Menurut Sabatier (1986) kesenjangan persepsi dapat terjadi karena model pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai, karena kondisi dan tempat dimana implementor mengambil keputusan kebijakan didominasi oleh pencapaian di tingkat pemerintah pusat maka pelaksanaan bersifat sentralistik atau merefleksikan *model top down*. Menurut pendapat Van Horn (1975) yang mengatakan sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangan dan manfaat kebijakan terhadap kepentingan individu atau kelompok. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi diantaranya Pengetahuan, Pemahaman dan Aksi dari pelaksana; Respon dari pelaksana; Kebijakan yang dilakukan secara kontinu

Pengawasan Kebijakan

Pengawasan merupakan kegiatan penting pada fungsi implementasi kebijakan untuk melihat proses pelaksanaan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, selain itu pengawasan merupakan satu alat yang strategis untuk mendeteksi potensi permasalahan sehingga dapat langsung dilakukan upaya perbaikan. Pada hasil analisis persepsi nelayan dan pelaksana teknis terjadi kesenjangan yang signifikan, hal ini terjadi karena para pengawas dari pemerintah yang ditunjuk tidak memahami esensi dan dampak dari kebijakan yang dilaksanakan, tidak berfokus pada satu kebijakan dalam arti implementasi pengawasan harus berdasar pada fokus kebijakan, landasan hukum dan informasi update mengenai objek dan subjek yang diawasi. Menurut Radarwati et al. (2010) pengawasan dapat efektif apabila dilakukan pengaturan anggaran, pengaturan sumber daya dan pengaturan perilaku. Fokus utama dalam pengawasan adalah pengaturan perilaku dengan asumsi pelaksana teknis untuk melakukan standar kebijakan, evaluasi kebijakan, perbandingan dan perbaikan kebijakan. Oleh karena itu perlu peran nelayan/ masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap proses kebijakan, apabila kebijakan tersebut dapat merugikan Desa Muara Gading Mas maka berhak melakukan gugatan yang bernama *citizen lawsuit* adalah pola pengembangan dari sistem *class action* pada hukum di Indonesia yang diambil dari sistem di negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang merupakan tindak pemikiran hasil pengawasan yang memiliki data konkrit

bahwa pemerintah memberikan dan melaksanakan kebijakan tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan kebijakan sebelumnya, dengan begitu pemerintah dalam membuat kebijakan akan memperhatikan kepentingan umum di desa tersebut. (Manan, 1995)

Sarana Prasarana dan Lingkungan

Keberhasilan dari sebuah kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya faktor sarana dan prasarana. Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan perikanan tangkap. Hasil persepsi nelayan dan pelaksana teknis mengatakan bahwa ragu-ragu dalam kelengkapan sarana prasarana di Desa Muara Gading Mas, hal mendasar yang menjadi permasalahan antara lain anggaran dana yang terbatas yang berdampak pada akses jalan rusak, kurangnya fasilitas PPP Labuhan Maringgai, kemudian masyarakat dan pelaksana teknis terkesan acuh dalam pemanfaatan serta perawatan sarana prasarana yang ada di desa tersebut. Untuk itu perlu dilakukan strategi mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut (1) Memberikan akses jalur alternatif menuju PPP Labuhan Maringgai, sampai perbaikan akses jalan utama selesai. Hal ini sesuai dengan Astutik dan Santoso (2013) bahwa jalan alternatif dapat menjadi pilihan jika akses jalan utama banjir untuk menghindari kemacetan. (2) Menurut Pulu et al. (2014) perlu dilakukan adopsi teknologi perikanan yang modern dengan mengirimkan beberapa nelayan untuk belajar teknologi di wilayah pesisir yang telah maju meliputi alat tangkap, unit penangkapan dan pelatihan budidaya ikan

Selain itu kondisi lingkungan perlu di perhatikan, berkurangnya ekosistem mangrove di perairan menyebabkan menurunnya kualitas hasil tangkapan, padahal ekosistem mangrove sangat penting keberadaannya, secara ekologis, fungsi mangrove itu sendiri melindungi dan melestarikan kawasan pesisir karena sistem akarnya mampu menahan lumpur dan polutan (Febryano et al., 2015). Kemudian pembuangan limbah rumah tangga oleh masyarakat pesisir yang masih dibuang di pinggir dermaga, fasilitas MCK yang masih ada di pinggir dermaga dan tidak ada tempat pembuangan akhir sampah yang membuat lingkungan perairan tercemar.

Beberapa uraian indikator-indikator tersebut ditemukan permasalahan utama pada kesenjangan hasil persepsi nelayan dan pelaksana teknis meliputi pada nelayan adanya sistem patron klien yang

mendominasi sampai saat ini. Patron klien menurut Scott (1983) merupakan merupakan pertukaran hubungan antara kedua individu yang status ekonomi lebih tinggi untuk menyediakan keperluan yang dibutuhkan bagi nelayan ekonomi, selanjutnya nelayan akan membayar jasa atau barang sebagai imbalan, beberapa hal yang dibutuhkan nelayan anatara lain: Biaya operasional ransum, perawatan kapal, pembelian alat tangkap; Patron memberikan pinjaman uang ketika musim paceklik dan akan dibayar klien pada saat musim ikan; Klien mendapatkan jaminan distribusi hasil tangkapan

Hal ini didukung dengan penelitian Tain (2013), menjelaskan pola kerja *patron klien* yang terjadi di Desa Jatirejo Lekok Pasuruan adalah nelayan yang terikat dengan juragan, dan menerima berapapun harga yang diberikan oleh juragan mereka. Dapat disimpulkan sistem tersebut menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang menghambat keberhasilan kebijakan. Hal itu terus menerus terjadi karena sampai saat ini pemerintah sebagai fasilitator tidak memberikan solusi atau kebijakan dalam mengatasi sistem tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan nelayan dan peneliti diperoleh solusi untuk mengurangi ketergantungan sistem *patron klien* dengan melakukan kontrol perilaku nelayan menggunakan sistem rekayasa perilaku (*social engginer*) melalui program pembentukan koperasi/ badan usaha yang berizin yang di dukung oleh pemerintah untuk memfasilitasi modal nelayan sebagai pengganti dari pembina atau tengkulak. Pembentukan koperasi atau badan usaha sangatlah tidak mudah mengingat anggaran dana terbatas untuk Desa Muara Gading Mas. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan *bottom up* untuk merekrut pembina atau tengkulak sebagai investor dana di koperasi atau badan usaha tersebut dengan memberikan keuntungan yang telah disepakati, tetapi tetap berlandaskan hukum, dan sisi ekologi.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat dan pelaksana teknis secara umum terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan pencapaian yang diinginkan tidak berhasil di desa Muara Gading Mas. Kesenjangan tersebut disebabkan dua faktor meliputi adanya sistem *patron klien* pada tingkat nelayan yang masih bertahan sampai saat ini, faktor kedua kebijakan pemerintah selama ini tidak berfokus pada mengatasi cara memutus

sistem *patron klien* tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan rekayasa perilaku nelayan terhadap sistem tersebut dengan mendirikan koperasi atau badan usaha yang berizin didukung pemerintah sebagai subjek pengganti pembina atau tengkulak. Selain itu, dilakukan pendekatan *bottom up* terhadap pembina atau tengkulak dengan menjadikan anggota koperasi atau badan usaha tersebut.

REFERENSI

- Agustino, L. 2006. Dasar-dasar kebijakan publik. CV. Alfabeta. Bandung. p.51-54
- Astutik Y. & Santoso E.B. 2013. Prioritas Wilayah Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(1): 20-24. DOI: 10.12962/j23373539.v2i1.2464
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C. & Hidayat, A. 2015. Actor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2):125-142. DOI: 10.20886/jakk.2015.12.2.125-142
- Febryano, I.G., Supono., Damai, A.A., Hartoyo., Rohana & Novriyanti. 2021. Fisherman Attitude on Fisherman Insurance in Bandar Lampung City. *Advances in Engineering Research*, 202: 119-126. DOI: 10.2991/aer.k.210603.020
- Ginangjar, M.A., Suyasa, I.N. & Dewi, I.T.J.P. 2022. Karakteristik perikanan tangkap di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Agribisnis Perikanan*, 15(1): 226-238. DOI: 10.52046/agrikan.v15i1.226-238
- Grindle, M.S. 1980. Politics and policy implementations in the thrid word. New Jersey. Princenton. University Press. Hal 244 - 249
- Gumilar, G.G. & Nuryasin, H. 2022. Efektivitas program pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Karawang. *Jurnal IDEAS*, 8(1): 273-284. DOI: 10.32884/ideas.v8i1.61
- Handrian, E. & Hawa, S. 2022. Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Admininstrasi Publik*, 10(1): 49-58. DOI: 10.31764/jiap.v10i1.7749
- Hardian, D., Febryano, I.G., Supono., Damai, A.A. & Winarno, G.D. 2020. Pelarangan Cantrang: Strategi Pengembangan

- Keberlanjutan Sumberdaya Ikan Di Teluk Lampung. *Journal of Tropical Marine Science*, 3(1): 21-27. DOI: 10.33019/jour.trop.mar.sci.v3i1.1734
- Manan, B. 1995. Empat Tulisan tentang Hukum. Universitas Padjajaran PPBKU Hukum Ketatanegaraan. Bandung. Hal 3
- Mazmanian, D.A, and Sabatier, P.A. 1983. Implementation and Public Policy. Scott Foresman and Company, USA. p.244-256
- Novianto, A., Sriati & Purnama, D.H. 2022. Resiliensi ekonomi kelompok nelayan perikanan tangkap kawasan perkotaan. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(2): 115-129. DOI: 10.25077/jsa.8.2.115-129.2 022
- Nugroho, R. 2003. Kebijakan publik, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta. Elex media komputindo
- Nursan, M. & Septiadi, D. 2021. Strategi pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Bisnis Tani*, 7(2): 54-66. DOI: 10.35308/jbt
- Parson, W. 2001. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Kebijakan. Kencana. Jakarta. Hal 446 – 449
- Pratiwi, N.K.O. 2019. Analisis SWOT untuk meningkatkan kunjungan wisata di objek wisata Goa Gajah Desa Bedulu, Kecamatan Blah batuh, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1): 95-105. DOI: 10.23887/jjpe.v11i1.20079
- Ramlan, S., Adimu, H.E., Asni & Fekri, L. 2022. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12(1): 1-10. DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10573
- Radarwati S., Baskoro M.S., Monintja, D.R. & Purbayanto, A. 2010. Analisis Faktor Internal-Eksternal dan Status Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Teluk Jakarta. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 1(2):1-13. DOI: 10.24319/jtpk.1.33-46
- Ririhena, J.E., & Kour, F. 2022. Permasalahan dan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Kepulauan Aru. *Jurnal Harpodon Borneo*, 15(2): 103-115. DOI: 10.35334/harpodon.v15i2.3000
- Pulu J., Baskoro M.S., Monintja, D.R., Iskandar, B.H. & Fauzi, A. 2011. Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Talud. *Marine Fisheries Journal*. 2(1): 75-85. DOI: 10.29244/jmf.2.1.75-85
- Sabatier, P.A. 1986. Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. *Journal of Public Policy*, 6: 21-48. DOI: 10.1017/S0143814X00003846
- Scott, J.C. 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES. Jakarta. Hal 249-263
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Hal 244-334
- Situmeang, M.K. 2022. Modal sosial nelayan pengguna cantrang di pantai pelabuhan perikanan tangkap Kabupaten Batang Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 3(2): 142-167. DOI: 10.22373/jsai.v3i2.1779
- Tain, A. 2013. Faktor Dominan Penyebab Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Motor Tempel di Wilayah Tangkap Lebih Jawa Timur. *Jurnal Sosiohumaniora*, 15(1): 38-39. DOI: 10.24198/sosiohum aniora.v15i1.5237